

PJS

Kapolri Harap Desk Ketenagakerjaan Polri Jembatani Sengketa Perusahaan dan Buruh

Hidajat - KOTABOGOR.PJS.OR.ID

Jan 21, 2025 - 08:35



Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri. Tujuannya untuk memberikan ruang penyelesaian bagi buruh yang bersengketa dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

"Dimana desk ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan kita terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang tentunya selama ini selalu terjadi" kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Jenderal Sigit tak menampik kondisi dan dinamika global selalu ada, termasuk dalam lini industri. Karena itu, kata dia, kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik, antara pekerja dan perusahaan.

"Yang kira harap desk ini bisa jadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri tenaga kerja, antara perusahaan dan tenaga kerja," ucapnya.

"Tentunya dengan desk ini kita harap ada saluran bagi rekan tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhan," lanjut Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan, secara struktural desk ketenagakerjaan akan ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) di bawah kepemimpinan Brigjen Nunung Syaifuddin. Tak hanya di tingkat Mabes Polri, Desk Ketenagakerjaan Polri akan bekerja hingga ke tingkat daerah.

Di sisi lain, Jenderal Sigit berharap ke depan situasi dunia pekerja dapat terjaga dengan baik. Termasuk dengan memanfaatkan penyelesaian yang ada antara buruh dan tenaga kerja untuk sama-sama bisa terlindungi.

"Dan harapan kita ke depan dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia juga memiliki daya saing dalam bersaing dengan industri-industri yang ada di luar negeri dan kualitas-kualitas produksi kita juga mampu untuk mengisi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri," harapnya.

Turut hadir dalam peluncuran desk itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wamenaker Immanuel Ebenezer, Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.